

PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT BUMIPUTRA, EROPA, DAN CINA DI JAWA, ABAD KE-17 HINGGA AWAL ABAD KE-20

Mohammad Masrudin Firdiyansyah¹.

¹Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada

Masrudin049@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat kolonial di Jawa dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20, dengan menekankan dinamika relasi antara kelompok Bumiputra, Cina, dan Eropa dalam konteks kebijakan kolonial yang terus berubah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penelitian yang secara komprehensif melihat bagaimana kebijakan kolonial yang menindas sekaligus menciptakan peluang mobilitas sosial bagi kelompok tertentu. Dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menelusuri kronologi perubahan sosial dalam lintas periode kolonial, mulai dari masa VOC, tanam paksa, liberalisasi ekonomi, hingga politik etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat kolonial bersifat fluktuatif. Masing-masing kelompok mengalami fase dominasi dan kemunduran tergantung pada kedekatannya dengan kekuasaan kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya menghasilkan ketimpangan yang statis, melainkan juga membuka ruang terbatas bagi perubahan sosial. Studi ini berkontribusi pada historiografi kolonial Indonesia dengan menyoroti pentingnya pendekatan diakronis dalam memahami dinamika sosial masyarakat multietnis di bawah kekuasaan kolonial.

Kata Kunci: kolonialisme; perubahan sosial; Bumiputra; Eropa; Cina;

Pendahuluan

“Segala sesuatu mengalir. Tak ada yang abadi kecuali perubahan.”

— Heraclitus (Müller-Merbach, 2006),

Ungkapan Heraclitus tersebut menemukan relevansinya dalam studi tentang masyarakat kolonial, yang kerap diasumsikan sebagai struktur sosial yang ajek dan hierarkis. Dalam wacana historiografi Indonesia, kolonialisme sering digambarkan sebagai sistem dominasi yang timpang, di mana penduduk Bumiputra menjadi korban pasif dari eksploitasi politik dan ekonomi oleh kolonial Belanda (Purwanto, 2004). Perspektif ini, meskipun valid, cenderung mengabaikan kompleksitas dan dinamika internal masyarakat kolonial itu sendiri—terutama pergeseran relasi antar kelompok etnis seperti Bumiputra, Cina, dan Eropa dalam konteks perubahan kebijakan kolonial yang fluktuatif.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengungkap ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi yang dihadapi rakyat kolonial, khususnya Bumiputra, dalam rentang waktu yang panjang dapat dilihat dari karya-karya klasik Sartono Kartodirdjo *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* (1987), M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (2008), George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (2013), serta studi-studi tentang eksploitasi struktural seperti Sailal Arimi

(2008) dan Nurmalasyari dkk. (2024). Namun, karya-karya ini cenderung kurang menggali dinamika sosial intra dan antar kelompok etnis di bawah kolonialisme.

Artikel ini bertolak dari asumsi bahwa struktur sosial masyarakat kolonial di Jawa tidak bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan yang kompleks dan tidak linier. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh intervensi kolonial, yang tidak hanya membuat satu kelompok menjadi termarginalkan tetapi memungkinkan kelompok lain untuk melakukan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, masyarakat kolonial lebih tepat dipahami sebagai sebuah konfigurasi relasi kuasa yang terus bergeser, bukan sekadar piramida kekuasaan yang beku.

Studi ini mengambil fokus pada tiga kelompok utama yang hidup berdampingan dalam lanskap kolonial Jawa: Bumiputra, Cina, dan Eropa. Ketiganya mengalami perubahan posisi sosial-ekonomi yang signifikan dalam rentang abad ke-17 hingga awal abad ke-20, seiring dengan perubahan rezim politik dan ekonomi yang silih berganti—mulai dari masa VOC, reformasi Daendels dan Raffles, tanam paksa, liberalisme ekonomi, hingga politik etis. Meskipun mencakup semua kelompok, fokus utama diarahkan pada masyarakat Bumiputra, mengingat tingkat dinamikanya yang paling mencolok—baik dalam relasinya dengan kelompok Eropa dan Cina, maupun dalam relasi internal antara elite (priayi) dan masyarakat biasa. Sementara itu, transformasi sosial kelompok Cina dan Eropa cenderung lebih stabil pada fase-fase awal kolonialisme, dan baru mengalami guncangan signifikan dalam era liberalisme dan politik etis.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 2013). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan dinamika perubahan sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks kolonial yang berlangsung dalam kurun waktu panjang (abad ke-17 hingga awal abad ke-20). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap proses perubahan tersebut hanya dapat dicapai melalui metode yang bersifat diakronis dan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh metode sejarah.

Pembahasan

Kedatangan Eropa dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Kolonial pada Abad ke-17

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di pesisir Jawa telah menunjukkan kemajemukan sosial dan ekonomi yang kompleks. Komunitas Bumiputra hidup berdampingan dengan para pendatang dari Cina, India, dan Arab—kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Interaksi dagang lintas etnis ini turut mempercepat penyebaran Islam, sekaligus menciptakan ruang sosial yang relatif egaliter di antara para pelaku ekonomi (Husain, 2017). Di antara kelompok tersebut, peran elite lokal seperti raja dan bangsawan sangat dominan. Mereka bukan hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai aktor ekonomi penting yang membiayai pelayaran, menetapkan cukai, dan bahkan memonopoli komoditas tertentu (Burger, 1962, hlm. 25).

Hubungan perdagangan antarkerajaan di Jawa dan luar Jawa kala itu didasarkan pada prinsip kesetaraan. Misalnya, raja Jawa dapat mengirimkan utusan diplomatik ke Tiongkok sekaligus memberi mereka kebebasan berdagang, dan sebaliknya, para utusan dari Tiongkok pun diperlakukan serupa oleh penguasa Jawa (Burger, 1962, hlm. 28). Namun, kesetaraan ini mulai terkikis ketika VOC, sejak awal abad ke-17, menancapkan dominasinya dalam sektor politik dan ekonomi.

VOC secara sistematis menggerus otonomi ekonomi para bangsawan lokal dengan mengambil alih hak monopoli, penarikan cukai, dan penguasaan jalur distribusi komoditas strategis (Robinson, 2012, hlm. 15). Peran sebagai pelaku ekonomi utama yang sebelumnya dipegang bangsawan dan pedagang Bumiputra direduksi menjadi posisi subordinat. Para pedagang lokal dipaksa bertahan di pinggiran pasar, dan banyak di antaranya akhirnya hanya mampu berdagang komoditas pertanian atau kerajinan tangan di kawasan pedesaan dan sekitar pelabuhan (Purwanto, 2003, hlm. 292–293).

Pada saat inilah awal perubahan struktur sosial terjadi. Kelompok yang paling diuntungkan dari sistem baru ini adalah orang Eropa sendiri, disusul oleh orang Cina sebagai mitra ekonomi menengah. Orang Cina diberi konsesi atas tanah, hak pemungutan pajak, dan otoritas atas sejumlah aktivitas ekonomi seperti pasar, jalan, garam, dan rumah potong hewan (Robinson, 2012, hlm. 15). Jika sebelumnya orang Cina berfungsi sebagai penghubung antara penduduk lokal dan saudagar di Cina, di era VOC mereka bertransformasi menjadi perantara antara VOC dan masyarakat lokal (Kahin, 2013, hlm. 9).

Dominasi ekonomi orang Cina tidak terjadi secara alamiah, melainkan direayasa oleh VOC sebagai strategi untuk menciptakan kelas menengah kolaborator yang loyal. Mereka diangkat menjadi pemilik toko, pengelola pelabuhan, pengusaha pertanian, hingga kolektor hasil bumi dan pajak (Hellwig, 2007, hlm. 6–8). Dalam kacamata kolonial, keberadaan orang Cina diperlukan untuk meningkatkan efisiensi eksploitasi kolonial dan menghambat potensi perlawanan dari kelas menengah Bumiputra (Kahin, 2013, hlm. 9; Sahrasad, 2019, hlm. 210). Meskipun persekutuan ini sempat terhenti sementara pasca terjadinya geger Pecinan, persekutuan ini kembali harmonis beberapa waktu kemudian (Ota, 2006).

Di era VOC, mulai terlihat ketimpangan sosial dalam masyarakat. Eropa di puncak sebagai penguasa, disusul Cina sebagai mitra dagang istimewa, sementara Bumiputra tersingkir ke posisi paling bawah. Di dalam komunitas Bumiputra sendiri, fragmentasi sosial semakin tajam—pedagang kehilangan ruang gerak, sementara petani semakin tereksplorasi. Persaingan ekonomi menjadi tidak setara, dan mobilitas sosial kelompok lokal semakin terbatas di bawah sistem yang disusun untuk menguntungkan kelompok asing (Raben, 2000).

Perubahan struktur sosial ini juga berdampak kepada petani Bumiputra. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, petani Bumiputra menikmati tingkat keleluasaan tertentu dalam mengelola lahan pertanian. Dua bentuk kepemilikan lahan yang umum kala itu adalah kepemilikan pribadi dan komunal. Petani yang memiliki hak guna lahan secara pribadi dikenal sebagai sikep, yakni individu yang memperoleh hak atas tanah dari raja atau priayi setelah membuka suatu wilayah pemukiman. Sebagai imbalannya, mereka membayar upeti kepada raja sebesar sepertiga hingga setengah dari hasil panen, serta menyediakan tenaga kerja untuk kerja bakti pada pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan (Onghokham, 2008, hlm. 8–9 & 153).

Namun, posisi sikep tidak sepenuhnya subordinatif. Mereka memiliki ruang negosiasi melalui mobilitas spasial—dapat berpindah ke wilayah lain jika beban upeti dianggap memberatkan. Relasi dengan buruh tani atau numpang, yang hidup di atas tanah milik sikep, juga bersifat relatif fleksibel. Buruh tani bisa memilih sikep lain yang dianggap lebih ringan bebannya. Dengan demikian, sistem sosial pertanian pra-kolonial, meskipun hierarkis, mengandung unsur timbal balik dan resistensi yang

membuatnya tidak sepenuhnya otoriter (Kahin, 2013, hlm. 2; Onghokham, 2018, hlm. 158 & 167; Wahyono, 2017, hlm. 303).

Situasi ini berubah drastis ketika VOC memanfaatkan sistem feodal lokal untuk kepentingan ekspansi komersialnya. VOC tidak menghapus struktur kekuasaan lokal, melainkan menyusunnya ulang dalam kepentingan kolonial. Priayi dan bangsawan dijadikan agen kolonial yang bertugas memobilisasi tenaga dan hasil panen petani demi mendukung perdagangan ekspor VOC. Di bawah kendali VOC, kewajiban upeti yang sebelumnya bersifat normatif berubah menjadi beban eksploitatif yang melampaui ketentuan resmi. Petani sering kali dipaksa menyerahkan lebih dari separuh hasil panennya dan diwajibkan bekerja dalam proyek non-pertanian (Itawan, 2023, hlm. 158; Kahin, 2013, hlm. 4–7).

Dominasi VOC membuat petani kehilangan alat negosiasi yang sebelumnya mereka miliki. Dukungan militer VOC kepada bangsawan dan priayi menghilangkan kemampuan petani untuk menuntut hak mereka. Dalam konteks ini, muncul fragmentasi baru dalam struktur sosial internal Bumiputra, di mana bangsawan dan priayi—meskipun kehilangan peran dominan di sektor perniagaan—justru memperkuat kuasa politik mereka di tingkat desa dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Mereka tetap memungut hasil panen dari petani meskipun setoran kepada VOC telah terpenuhi, demi membiayai ritual, gaya hidup, dan kebutuhan konsumtif lainnya (Kahin, 2013, hlm. 6–8).

Sementara petani Bumiputra makin terpinggirkan, pejabat VOC menikmati hasil eksploitasi tersebut. Pada abad ke-18, gaya hidup pejabat VOC berubah drastis dari kesederhanaan menjadi kemewahan. Mereka membangun rumah besar dan mengonsumsi barang mewah sebagai simbol status. Konsumerisme ini mendorong praktik korupsi yang sistemik di dalam tubuh VOC, dari gubernur jenderal hingga juru tulis, yang mencari penghasilan tambahan melalui penyalahgunaan wewenang (Kroef, 1948, hlm. 123). Pada akhirnya, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC menjadi salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan ini. Pada 1 Januari 1800, Republik Batavia secara resmi mengambil alih utang, harta, dan kekuasaan VOC atas Hindia Belanda (Kroef, 1948, hlm. 134).

Upaya Perubahan di Era Daendels dan Raffles yang tidak Berhasil

Transformasi dalam struktur kekuasaan kolonial terjadi setelah Belanda berada di bawah kendali Prancis pada 1806. Pembentukan Kerajaan Belanda di bawah Louis Bonaparte membawa dampak langsung ke Hindia Belanda, terutama melalui penunjukan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Jawa pada 1808. Dalam upaya modernisasi administratif, Daendels secara sistematis mengurangi otonomi politik dan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan priayi. Mereka direduksi menjadi aparat negara bergaji yang tunduk pada otoritas pusat, bukan lagi sebagai penguasa wilayah dengan kekuasaan patrimonial. Ini merupakan awal dari integrasi elite lokal ke dalam struktur kolonial sebagai *functionarissen* (pejabat negara), yang menandai pergeseran dari kekuasaan feodal ke model birokrasi kolonial yang lebih rasional dan terpusat (Sutherland, 1983, hlm. 37).

Reformasi ini mengikis basis kekuasaan tradisional bangsawan—baik politik maupun ekonomi—dan menempatkan mereka dalam kerangka baru sebagai bagian dari birokrasi kolonial. Identitas mereka mengalami reklasifikasi: dari penguasa lokal yang semi-otonom menjadi priayi kolonial. Priayi kolonial ini tidak hanya terdiri dari keturunan bangsawan tetapi juga elite birokrasi pribumi non-bangsawan yang berhasil menjadi priayi karena sistem meritokrasi. Namun, transformasi

ini bersifat parsial karena status sosial dan latar belakang keluarga tetap menjadi penentu dalam rekrutmen birokrasi, memperlihatkan bahwa struktur sosial lama tetap membatasi transisi ke birokrasi meritokratis (Carey, 2011, hlm. 302 & 305; Pratama, 2024, hlm. 14).

Kebijakan reformasi birokrasi dilanjutkan dan diperluas oleh Thomas Stamford Raffles setelah Inggris mengambil alih Jawa pada 1811. Raffles berupaya menciptakan hubungan langsung antara negara kolonial dan petani melalui penghapusan kerja rodi dan sistem penyerahan hasil paksa. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan *land rent system*, di mana pemerintah kolonial menjadi pemilik tanah formal dan petani diwajibkan membayar sewa berdasarkan nilai produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat agraris yang rasional dan bebas dari dominasi elite lokal, seperti dalam model agraria Inggris dan India (Iswahyudi, 2021, hlm. 6672).

Namun, idealisme Raffles berbenturan dengan realitas sosial dan geografis Jawa yang kompleks. Pemerintah kolonial Inggris pada saat itu tidak memiliki birokrasi yang cukup kuat maupun data yang akurat untuk menerapkan sistem sewa tanah secara menyeluruh. Tidak ada pemetaan agraria yang sistematis, dan pengetahuan tentang struktur kepemilikan serta penguasaan tanah di tingkat desa sangat terbatas. Akibatnya, meskipun secara prinsip Raffles ingin menyingkirkan peran para priayi, dalam praktiknya ia tetap harus bergantung pada mereka. Para elite lokal masih memegang kendali atas informasi penting terkait batas-batas tanah, kesuburan lahan, serta struktur sosial desa (Wahid, 2021, hlm. 33).

Meskipun terdapat sedikit perubahan, tidak terjadi perubahan signifikan dalam struktur masyarakat di periode ini. Orang Eropa masih menempati puncak hierarki, disusul dengan Orang Cina, dan Bumiputra. Di internal Bumiputra sendiri, priayi tetap menjadi aktor yang dapat dengan leluasa menggunakan pengaruhnya untuk menekan para petani. Petani yang diharapkan menjadi agen ekonomi yang mandiri justru semakin tereksklusi karena beban sewa, fluktuasi harga, dan ketidakpastian panen.

Krisis Keuangan dan Penguatan Struktur Feodal dalam Sistem Tanam Paksa

Krisis keuangan yang melanda pemerintah kolonial pasca-gagalnya ekspedisi militer melawan Belgia dan meningkatnya perlawanan rakyat di Nusantara memaksa pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah drastis. Di tengah dilema antara membuka keran liberalisasi ekonomi atau menghidupkan kembali sistem monopoli seperti pada masa VOC, pilihan jatuh pada opsi kedua. Untuk menjamin efektivitas monopoli tersebut, pemerintah kolonial memperkuat kembali peran elite tradisional, khususnya kaum priayi lokal (Kahin, 2013, hlm. 11).

Bupati, sebagai figur sentral dalam struktur pemerintahan lokal, diposisikan kembali sebagai ningrat dengan hak-hak istimewa yang sebelumnya sempat dikurangi. Mereka kembali diberi wewenang mewariskan jabatan, memungut hasil panen, dan mengelola wilayah administratif secara semi-otonom. Strategi ini bukan hanya menandai kemunduran dari proyek rasionalisasi birokrasi Daendels, tetapi juga memperkuat kembali struktur kekuasaan patrimonial di tingkat lokal (Kahin, 2013, hlm. 15; Sutherland, 1983).

Restorasi kekuasaan priayi ini menciptakan hubungan patronase yang lebih erat antara elite lokal dan pemerintah kolonial. Para bupati menjadi agen kolonial yang loyal karena merasa berhutang budi. Kepala desa pun menunjukkan kecenderungan serupa. Mereka lebih mengabdikan kepada negara dan atasan birokratisnya ketimbang kepada komunitasnya sendiri. Negara kolonial tidak lagi sekadar

menaklukkan elite lokal, tetapi juga melibatkan priayi dalam proyek eksploitasi ekonomi melalui sistem tanam paksa (Kahin, 2013, hlm. 15; Zanden & Marks, 2010, hlm. 97).

Priayi mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tanaman ekspor yang ditanam oleh petani, sementara pegawai sipil Eropa seperti residen, asisten residen, dan *controleur*—menerima komisi dari hasil panen ekspor, suatu pendapatan di luar gaji tetap mereka. Dengan demikian, struktur kolonial menciptakan persekutuan ekonomi lintas ras antara elite Eropa dan elite lokal. (Hellwig, 2007, hlm. 14; Zanden & Marks, 2010, hlm. 98).

Orang-orang Cina juga mendapatkan peran strategis dalam sistem tanam paksa, terutama dalam sektor industri gula. Pemerintah kolonial memberikan mereka akses kredit untuk membangun pabrik, menjamin suplai tenaga kerja, dan memastikan petani menanam tebu di lahan terbaik. Gula yang diproduksi oleh orang Cina ini nantinya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang tetap. Dengan skema ini, posisi orang Cina tidak hanya berhasil menjadi pedagang perantara tetapi juga sosok kapitalis pemilik gula (Zanden & Marks, 2010, hlm. 98).

Meskipun berada pada posisi bawah, sebagian kecil petani Bumiputra sempat merasakan dampak positif dari sistem tanam paksa, terutama pada 1830-an. Peningkatan harga komoditas di pasar global memberi mereka pendapatan tambahan dari penjualan hasil pertanian. Ketersediaan beras juga relatif cukup, bahkan terkadang mencapai surplus sehingga kelebihanannya bisa dijual. Indikator kesejahteraan seperti kemampuan membayar pajak dan konsumsi barang manufaktur pun meningkat. Penduduk tak bertanah turut terlibat dalam ekonomi baru ini, baik sebagai buruh pabrik gula maupun pedagang kecil (Fernando, 1998, hlm. 149–152; Padmo, 1998, hlm. 173–174).

Namun, fenomena ini bersifat sementara dan terbatas secara geografis. Memasuki 1840-an, keuntungan yang didapatkan petani berkurang. *Pertama*, harga komoditas menurun drastis di pasar internasional. Hal yang pada gilirannya menggerus pendapatan petani (Zanden & Marks, 2010, hlm. 108–109). *Kedua*, kebijakan pembayaran berbasis produksi pabrik, bukan volume atau jumlah pasokan yang disetorkan oleh petani, sehingga menciptakan celah untuk mengakali petani. Bahkan, banyak petani tidak menerima bayaran sama sekali karena rendahnya hasil produksi pabrik (Furnivall, 2009, hlm. 146–147; Hellwig, 2007, hlm. 14).

Di balik kewajiban menanam tanaman ekspor, petani pemilik tanah di Jawa juga menghadapi tanggungan lain. Selain harus menyerahkan sebagian hasil tanam mereka kepada pemerintah kolonial, mereka juga diwajibkan membayar sewa tanah (*landrente*) serta menjalani kerja rodi yang tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga untuk aparat lokal seperti kepala desa dan pejabat daerah. Tugas yang dibebankan meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung, layanan pos, penjagaan desa, hingga tugas administratif lainnya. Dengan demikian, status sebagai pemilik tanah bukannya menjadi bentuk jaminan kesejahteraan, melainkan justru menjadi dasar legal bagi negara kolonial untuk membebani mereka secara lebih berat dibandingkan mereka yang tidak memiliki tanah (Hermawati, 2013, hlm. 65).

Meskipun penduduk tak bertanah juga tidak lepas dari eksploitasi—mereka diwajibkan bekerja di tanah pemerintah selama 66 hari per tahun—beban yang lebih kompleks pada petani pemilik tanah mendorong terjadinya pergeseran kepemilikan tanah. Banyak petani pemilik tanah yang akhirnya memilih untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah desa demi mengurangi tanggungan kerja dan pajak yang kian menjerat. Akibat dari proses ini, luas tanah komunal (desa) bertambah secara

signifikan selama periode tanam paksa. (Hermawati, 2013, hlm. 65 & 68; Onghokham, 2018, hlm. 154, 158, 168–169) Dengan demikian, kondisi petani secara umum pada periode ini tetap menderita.

Struktur sosial pada periode ini juga relatif tidak berubah : Eropa di puncak, diikuti oleh orang Cina, dan Bumiputra, yang mana petani Bumiputra tak bertanah menjadi kelompok yang paling rentan. Struktur ini ditegaskan melalui segregasi rasial yang diterapkan pada tahun 1854. Melalui sistem ini, orang Eropa ditetapkan sebagai puncak hierarki, disusul oleh orang Timur Asing dan Bumiputra (Latif, 2015, hlm. 274). Sebuah hierarki yang mempertegas perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal mendasar lainnya.

Liberalisasi Ekonomi, Pendatang Baru, dan Marginalisasi Masyarakat Hindia

Liberalisasi ekonomi yang dimulai sejak tahun 1870, melalui kebijakan *Agrarische Wet*, menandai pergeseran besar dalam struktur sosial masyarakat kolonial Hindia Belanda. Jika sebelumnya akses terhadap sumber daya ekonomi lebih banyak dimonopoli oleh birokrat kolonial, maka kini terbuka lebar bagi pemodal swasta Eropa yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan struktur pemerintahan (Achdian, 2020, hlm. 97). Hal ini melahirkan konfigurasi kekuasaan baru, di mana kelas kapitalis industri mulai menggantikan dominasi pegawai sipil sebagai aktor ekonomi utama.

Kondisi ini turut mendorong arus migrasi orang Eropa dari negeri asal ke Hindia dalam jumlah signifikan. Mereka datang bukan sebagai pejabat kolonial, melainkan sebagai tenaga terampil yang dibutuhkan oleh sektor industri dan perkebunan yang tengah berkembang pesat. Keterbatasan lembaga pendidikan lokal dalam mencetak tenaga kerja industri, serta terbukanya jalur pelayaran melalui Terusan Suez, semakin mempercepat proses ini (Basundoro, 2016, hlm. 98; Bosma, 2007, hlm. 525).

Para pendatang Eropa tersebut kemudian bekerja di industri perkotaan yang menunjang industri perkebunan atau di sektor perkebunan itu sendiri. Mereka mulai menyewa lahan pertanian milik penduduk Bumiputra untuk menanam tebu, yang kemudian ditanam secara bergiliran dengan padi yang biasanya telah dibudidayakan oleh petani Bumiputra pada musim hujan. Dengan menjalin persekutuan dengan kepala desa yang memiliki kendali atas tanah komunal, para pengusaha Eropa memperoleh lahan dan tenaga kerja dengan biaya murah (Wertheim, 1956, hlm. 93). Pada periode ini, pengusaha Eropa berhasil mengendalikan sektor ekonomi utama, terutama di bidang perkebunan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai pengelola dan pengorganisir komoditas pertanian yang diekspor ke Eropa (Blackburn, 2011, hlm. 96; Eng, 1998, hlm. 15; Idi, 2018, hlm. 436).

Namun, munculnya kelas kapitalis baru ini disertai dengan marginalisasi terhadap kelompok Eropa lama, khususnya orang Indo-Eropa dan mantan militer yang telah menetap di Hindia. Jika pada masa sebelumnya mereka masih memiliki ruang dalam struktur ekonomi kolonial, maka kini mereka mulai terpinggirkan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang diprasyaratkan. Oleh sebab itu, para pengusaha swasta lebih memilih merekrut Eropa totok terdidik dari negeri asal ketimbang mempekerjakan mantan militer dan Indo-Eropa yang lahir di tanah jajahan. Khusus untuk orang Indo-Eropa, penolakan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kualifikasi pendidikan, melainkan juga oleh prasangka rasial yang melekat di kalangan elite Eropa. Bahkan ketika tidak ada pelamar yang memenuhi syarat, pengusaha tetap lebih memilih mendatangkan pekerja dari Eropa daripada mempekerjakan Indo-Eropa yang setara secara pendidikan. Namun, tidak lantas kemiskinan orang

Indo-Eropa dimulai pada periode ini, pada awal abad ke-19, orang Indo-Eropa sudah banyak yang miskin. Hanya saja marginalisasi Indo-Eropa pasca tahun 1870 menjadi sebuah ironi, di saat kelompok ini sudah mulai diperhatikan dan diakui secara resmi menjadi kelompok Eropa. (“*De Inlandsche Kinderen en handenarbeid.*,” 1880; Mansvelt, 1932, hlm. 292; Nirwandhono, 2011; Ress, 1902, hlm. 9).

Liberalisasi ekonomi yang diberlakukan pada akhir abad ke-19 tidak hanya memperlebar jurang sosial di internal orang Eropa, tetapi juga memperdalam penderitaan kaum petani Bumiputra. Di tengah euforia pertumbuhan kapitalisme agraria, petani lokal justru kehilangan kendali atas tanah mereka sendiri. Untuk memenuhi tuntutan pasar ekspor, mereka terpaksa menyewakan lahan kepada pengusaha Eropa, yang memanfaatkannya untuk menanam komoditas ekspor, seperti tebu. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya ruang produksi pangan lokal, terutama padi, yang sejak masa awal tanam paksa sempat memberikan keuntungan bagi petani. Namun, pada era liberal, kesempatan menanam padi semakin terbatas, sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa diimbangi oleh ketersediaan pangan (Furnivall, 2009, hlm. 227; Wertheim, 1956, hlm. 93).

Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi juga terlihat jelas dalam sektor perdagangan. Meskipun industrialisasi membutuhkan jaringan distribusi hasil-hasil pertanian, penduduk Bumiputra gagal mengisi posisi sebagai pedagang perantara. Kekosongan ini justru diisi oleh orang Cina yang telah lebih dahulu memiliki pengalaman dalam perdagangan serta jaringan bisnis dengan pihak Eropa. Dengan modal dan pengetahuan ekonomi yang kuat, orang Cina mengambil alih peran strategis dalam rantai distribusi hasil pertanian, menjauhkan penduduk Bumiputra dari kemungkinan mobilitas sosial (Daliman, 2012, hlm. 49; Kahin, 2013, hlm. 30).

Dominasi orang Cina di sektor perdagangan diperkuat oleh faktor sejarah kolonial yang telah lama meminggirkan logika ekonomi petani. Sejak masa VOC dan tanam paksa, petani hanya dilibatkan sebagai produsen komoditas ekspor tanpa diajarkan bagaimana terlibat dalam perdagangan bebas. Akibatnya, mereka terputus dari dinamika pasar dan tidak memiliki kemampuan bersaing dengan pedagang Cina yang lebih mapan. Hilangnya insting ekonomi ini merupakan dampak panjang dari kebijakan kolonial yang menempatkan petani Bumiputra hanya sebagai obyek produksi, bukan sebagai subjek ekonomi yang otonom (Furnivall, 2009, hlm. 47–48; Kahin, 2013, hlm. 16).

Keterpinggiran ekonomi ini beriringan dengan segregasi spasial yang mengonstruksi ulang struktur sosial berdasarkan ras dan kelas. Pemerintah kolonial secara sengaja membagi kawasan perkotaan menjadi tiga klaster permukiman yang mencerminkan hierarki sosial rasial: Bumiputra, Timur Asing (seperti Cina dan Arab), dan Eropa. Permukiman Bumiputra ditandai oleh infrastruktur yang buruk, sanitasi rendah, serta minimnya akses terhadap air bersih dan listrik. Sebaliknya, permukiman Timur Asing lebih berkembang, meskipun tidak semodern kawasan Eropa. Sementara itu, kawasan Eropa dilengkapi dengan fasilitas kota modern seperti jalan beraspal, trem listrik, penerangan, dan toko-toko besar milik pengusaha Eropa (Basundoro, 2016, hlm. 78–79; Cobban, 1988, hlm. 281; Frederick, 1983, hlm. 259; Setiawan & Prasetyo, 2023, hlm. 60; Susilowati dkk., 2020, hlm. 172).

Dengan demikian, era liberal bukanlah masa pembebasan bagi penduduk Hindia, melainkan periode konsolidasi ulang kekuasaan kolonial dalam format baru. Struktur sosial yang terbentuk semakin tegas menempatkan Bumiputra sebagai kelompok paling subordinat—tidak hanya dalam

aspek ekonomi, tetapi juga dalam representasi ruang dan sosial. Liberalisasi ekonomi justru memperkuat stratifikasi sosial yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, dengan pengusaha Eropa dan orang Cina mengisi posisi dominan dalam sistem sosial dan ekonomi yang semakin hierarkis.

Politik Etis, Elite Baru, dan Tersingkirnya Elite Lama

Penerapan Politik Etis pada tahun 1901 menandai titik balik dalam struktur sosial kolonial Hindia Belanda. Kebijakan ini membuka akses pendidikan Barat bagi penduduk Bumiputra melalui pendirian berbagai sekolah baru pada awal abad ke-20. Akibatnya, jumlah kaum terdidik Bumiputra meningkat tajam dan mulai mengisi posisi-posisi yang sebelumnya dimonopoli oleh orang Eropa. Sebagai contoh, pada tahun 1911, jumlah pegawai negeri (*ambtenaar*) Bumiputra telah mencapai 26.000 orang, jauh melampaui jumlah pegawai negeri Eropa yang hanya 8.000. Jumlah ini melonjak drastis pada 1921 menjadi 128.549 orang Bumiputra, sementara jumlah Eropa hanya bertambah menjadi 20.021 (Firdiyansyah, 2024, hlm. 180).

Krisis ekonomi pada awal 1920-an mempercepat perubahan struktur ini. Biaya tinggi untuk mempekerjakan tenaga kerja Eropa menyebabkan para pengusaha dan pemerintah kolonial lebih memilih tenaga Bumiputra yang terampil dan berpendidikan. Sementara kelompok Bumiputra terdidik berhasil masuk ke sektor-sektor strategis, sebagian orang Indo-Eropa dan Eropa berdarah penuh justru mengalami kemunduran sosial. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan. Laporan pemerintah kolonial bahkan mencatat adanya orang Eropa totok yang terpaksa tinggal di markas polisi karena tidak mampu lagi membayar sewa rumah (*“De Werkeloosheid,”* 1922; *“Nederlandsch Indie,”* 1931; Ingleson, 1988, hlm. 926).

Namun, dampak paling besar dari mobilitas vertikal Bumiputra terdidik dirasakan oleh kelompok Indo-Eropa. Mereka berada dalam posisi terjepit: tersisih dari jabatan-jabatan tinggi oleh Eropa totok, dan dari pekerjaan menengah-bawah oleh Bumiputra yang kini mengisi sektor tersebut. Keterbatasan akses pendidikan membuat orang Indo sulit bersaing, terlebih karena mereka tidak lagi mendapat preferensi dalam kebijakan kolonial. Jika pada akhir abad ke-19 mereka tergeser oleh Eropa totok, maka pada abad ke-20 mereka tergeser oleh kaum Bumiputra yang baru terdidik (*“Arme Europeanen,”* 1936; Baay, 2010, hlm. 193).

Pendidikan menjadi kunci utama dalam struktur sosial baru ini. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula peluangnya untuk menempati posisi penting dan memperoleh gaji besar (Soekiman, 2014, hlm. 41). Reformasi birokrasi pada tahun 1913 mengubah syarat pengangkatan bupati dan pejabat tinggi lainnya, dari yang semula berbasis keturunan bangsawan menjadi berbasis kapabilitas dan latar belakang pendidikan (Zanden & Marks, 2010, hlm. 155). Meskipun keturunan bangsawan tetap diutamakan, orang-orang non-bangsawan terdidik mulai memperoleh peluang untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan administratif.

Konsekuensinya, para bangsawan yang sebelumnya menikmati hak istimewa secara turun-temurun mulai kehilangan prestise dan kekuasaan ekonomi mereka. Jika pada masa tanam paksa mereka adalah pilar penting dalam sistem kolonial, maka pada era ini mereka mulai tersisih oleh elite baru yang lahir dari sistem pendidikan kolonial meskipun mayoritas kaum terdidik ini anak dari kalangan priayi kelas menengah atas. Hanya di wilayah seperti Yogyakarta dan Surakarta, status sosial mereka tetap dihormati secara luas (Kuntowijoyo, 2007, hlm. 83 & 85).

Perubahan struktur sosial tidak hanya terjadi dalam birokrasi, tetapi juga dalam ekonomi urban. Penduduk Bumiputra yang memiliki modal mulai memainkan peran aktif dalam sektor perdagangan dan manufaktur, terutama di kota-kota besar. Ekonomi perkotaan tumbuh pesat, menggantikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi. Gelombang urbanisasi pun terjadi, penduduk desa bermigrasi ke kota untuk mencari peluang hidup yang lebih baik (Husain, 2020; Kuntowijoyo, 2007, hlm. 83).

Dalam proses ini, sejumlah penduduk Bumiputra—baik migran maupun penduduk kota lama—berhasil naik kelas sosial dengan menjadi pengusaha. Mereka aktif dalam industri tekstil dan rokok, dua sektor ekonomi yang berkembang pesat pada masa itu. Pabrik-pabrik tekstil Bumiputra muncul di kota-kota seperti Bandung, Kediri, Tulungagung, Surakarta, Yogyakarta, serta sepanjang jalur Pantura seperti Tegal, Semarang, Surabaya, dan Gresik. Sementara industri rokok Bumiputra yang paling menonjol berpusat di Kudus. Para pelaku usaha ini, bersama kalangan cendekia, pegawai pemerintah, dan pekerja swasta, membentuk kelas menengah baru di kawasan urban kolonial (Kuntowijoyo, 2007, hlm. 84–85).

Seiring meningkatnya jumlah Bumiputra yang berhasil menempati posisi strategis di pemerintahan dan sektor swasta, ketimpangan antar sesama Bumiputra pun melebar. Mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, modal, maupun keterampilan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Migrasi ke kota yang dilakukan dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik justru seringkali membawa sebagian besar dari mereka ke dalam kondisi marginal—tinggal di kolong jembatan, menghuni permukiman kumuh, dan hidup dari pekerjaan informal yang tidak menentu (Basundoro, 2012).

Dengan demikian, orang Bumiputra yang mampu menggeser posisi orang Eropa adalah mereka yang terdidik atau yang awalnya memang berasal dari kelas menengah, bukan Bumiputra tak terdidik dari kelas bawah. Menurut Wertheim (1956), keberhasilan segelintir orang Bumiputra dalam memperoleh kestabilan ekonomi melalui pendidikan dan perdagangan tidak mencerminkan perbaikan kondisi struktural secara menyeluruh. Justru, mayoritas Bumiputra tetap terpinggirkan secara ekonomi. Mereka yang telah menjadi pedagang menengah juga tetap rentan tergeser oleh pengusaha asing yang memiliki keunggulan modal dan jaringan perdagangan.

Ketimpangan ini juga diperkuat oleh dominasi Cina atas hasil pertanian. Di pedesaan, penguasaan ekonomi oleh pedagang Cina menyebabkan semakin menyempitnya akses Bumiputra terhadap lahan dan kesempatan kerja, yang kemudian memicu pengangguran dan pemiskinan (Furnivall, 2009, hlm. 428; Kahin, 2013, hlm. 24). Namun, dinamika sosial ini tidak hanya berdampak pada Bumiputra. Pada awal abad ke-20, sebagian orang Cina juga mengalami kemunduran signifikan. Mereka kehilangan hak istimewa dalam sistem *opiumpacht* ketika pemerintah kolonial menerapkan *Opiumregie* pada 1908. Penghapusan monopoli lisensi opium tersebut tidak hanya menghentikan pemasukan utama pakter Cina, tetapi juga meruntuhkan bisnis-bisnis tambahan seperti toko, peminjaman uang, dan usaha lainnya di pedesaan. Banyak pakter akhirnya jatuh miskin dan tidak dapat kembali ke posisi ekonomi mereka sebelumnya (Wahid, 2021, hlm. 158 & 180).

Dengan demikian, kelompok orang miskin sebenarnya tidak hanya orang Bumiputra tetapi juga orang Cina, Indo-Eropa dan orang Eropa berdarah penuh. Mereka banyak yang terjebak dalam pengangguran. Tenaga kerja yang berlebih itu juga tidak mampu ditampung oleh sektor industri yang

sedang bertumbuh. Hal tersebut dikarenakan akumulasi kapital justru terjadi di negeri induk, bukan di koloni. Akibatnya, industrialisasi hanya berkembang dalam ruang ekonomi yang sangat terbatas. Para pemilik modal kolonial lebih memilih berinvestasi dalam sektor yang lebih menguntungkan seperti perkebunan, pertambangan, jasa, dan transportasi daripada mendirikan industri pengolahan hasil pertanian di koloni, karena hal tersebut dianggap dapat mengganggu keuntungan dari ekspor bahan mentah ke Eropa (Bulkin, 1985).

Sementara itu, kelompok sosial yang tergolong sejahtera adalah mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber ekonomi. Menurut Kuntowijoyo (2007). para pengusaha besar, pejabat kolonial seperti gubernur jenderal, pedagang skala menengah, kaum terdidik, dan pemilik lahan pertanian luas di pedesaan merupakan golongan yang memperoleh pendapatan cukup besar dan dapat hidup layak. Namun, bagi penduduk—baik Bumiputra, Cina, Indo-Eropa, maupun Eropa totok—yang tidak memiliki modal, pendidikan, atau keterampilan, mereka terperangkap dalam jerat pengangguran dan kemiskinan (Furnivall, 2009, hlm. 228). Bahkan, dalam konteks krisis ekonomi global pada tahun 1930, latar belakang pendidikan pun tidak selalu menjamin peluang kerja yang sepadan.

Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa ketimpangan sosial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak hanya didasarkan pada perbedaan rasial, melainkan semakin dipertajam oleh diferensiasi kelas sosial internal di masing-masing kelompok etnis. Struktur kolonial, yang semula membelah masyarakat secara rasial, kini juga membentuk hierarki baru berdasarkan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan modal (Wertheim, 1947, hlm. 294–295).

Kesimpulan

Perubahan sosial-ekonomi masyarakat kolonial di Jawa antara abad ke-17 hingga awal abad ke-20 merupakan proses yang kompleks, tidak linier, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan kolonial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak serta-merta menghasilkan struktur sosial yang statis dan sepenuhnya timpang, tetapi justru menciptakan konfigurasi relasi kuasa yang fluktuatif dan sering kali ambivalen. Setiap kelompok etnis—baik Bumiputra, Cina, maupun Eropa—mengalami naik-turun posisi sosial-ekonominya tergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dan berkoalisi dengan kekuasaan kolonial. Orang Cina, misalnya, pada satu masa mendapat keistimewaan sebagai mitra strategis VOC, tetapi pada masa politik etis sebagian di antara mereka justru kehilangan sumber penghidupan akibat pencabutan konsesi opium. Demikian pula dengan orang Indo-Eropa dan Eropa berdarah penuh yang tidak lagi memiliki akses terhadap posisi birokrasi dan pekerjaan tertentu karena kalah saing, tidak memiliki pendidikan yang baik, dan adanya perubahan prioritas kebijakan pemerintah. Di sisi lain, sebagian Bumiputra yang memperoleh pendidikan kolonial mampu naik ke kelas menengah dan mengambil peran penting dalam sektor pemerintahan dan ekonomi. Namun, mayoritas penduduk Bumiputra tetap terpinggirkan akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, modal, dan tanah. Dengan demikian, kolonialisme menciptakan struktur sosial yang tidak sepenuhnya tertutup bagi mobilitas, tetapi hanya memberikan peluang terbatas bagi mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan dan pengetahuan. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan jangka panjang dan komparatif dalam memahami perubahan sosial masyarakat kolonial yang bersifat dinamis, berlapis, dan terikat pada konteks historis kekuasaan.

Referensi

- Achdian, A. (2020). Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota. *Jurnal Sejarah*, 3(1), 98–104.
- Arimi, S. (2008). Pergeseran Kekuasaan Bangsawan Jawa Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10(2), 1–22.
- Arme Europeanen. (1936, Agustus 26). *De locomotief*.
- Baay, R. (2010). *Nyai & Pergundikan di HIndia Belanda*. Komunitas Bambu.
- Basundoro, P. (2012). Ringkasan Disertasi: Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya tahun 1900-1960-an. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 427–457.
- Basundoro, P. (2016). *Pengantar Sejarah Kota*. Ombak.
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta: Sejarah 400 tahun*. Komunitas Bambu.
- Bosma, U. (2007). The Cultivation System (1830-1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, 38(2), 275–291.
- Bulkin, F. (1985). Nasib Publik dalam sebuah Republik. *Prisma*, No.8.
- Burger, D. H. (1962). *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (3 ed.). Pradnjaparamita.
- Carey, P. (2011). Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i2.12107>
- Cobban, J. L. (1988). Kampung and Conflict in Colonial Semarang. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 266–291. <https://doi.org/10.1017/S0022463400000564>
- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia Abad IX - Awal Abad XX*. Ombak.
- De Inlandsche Kinderen en handenarbeid. (1880, Mei 18). *De locomotief*.
- De Werkeloosheid. (1922, April 9). *Archipel-Post*.
- Eng, P. van der. (1998). Economic benefits from colonial assets: The case of the Netherlands and Indonesia 1870-1958. *Economic benefits from colonial assets*.
- Fernando, M. R. (1998). Pertumbuhan kegiatan non-pertanian Pribumi di Jawa, 1820-1880. Dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. LP3ES.
- Firdiyansyah, M. M. (2024). Hegemoni Pendidikan Kolonial dan Munculnya Amtenaar Bumiputra Di Jawa (1900–1932). *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/historia.v7i2.73863>
- Frederick, W. H. (1983). Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 14(2), 354–371. <https://doi.org/10.1017/S0022463400011012>
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Freedom Institute.
- Hellwig, T. (2007). *Cltra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hermawati, M. (2013). Tanam Paksa sebagai Tindakan Eksploitasi. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 64–70.
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Airlangga University Press.
- Husain, S. B. (2020). *Banjir di Kota Surabaya paruh Kedua Abad ke-20*. Ombak.
- Idi, A. (2018). The Political Ethnicity of the Dutch Colonialism towards the Islamic Sultanates in Indonesia: The Socio-Historical Perspectives. *The Journal of Social Sciences Research*, 4(12), 432–439.
- Ingleson, J. (1988). Urban Java during the Depression. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 292–309.

- Iswahyudi. (2021). - Raffles's observations of the arts of visual culture in Java during his reign in 1811-1816: -. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 8(10), Article 10. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v8i10.08>
- Itawan, D. (2023). Colonialism and Climate Crisis: The Root of Environmental Changes and the Rise of Environmental Awareness in Indonesia. *Indonesian Historical Studies*, 6(2), 192–205. <https://doi.org/10.14710/ihis.v6i2.16037>
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Ombak.
- Kroef, J. M. V. D. (1948). The Decline and Fall of the Dutch East India Company. *The Historian*, 10(2), 118–134. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6563.1948.tb00452.x>
- Kuntowijoyo. (2007). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (5 ed.). Gramedia.
- Mansvelt, W. M. F. (1932). *De Positie der Indo-Europeanen*. G. Kolff & Co.
- Müller-Merbach, H. (2006). Heraclitus: Philosophy of change, a challenge for knowledge management? *Knowledge Management Research & Practice*, 4(2), 170–171. <https://doi.org/10.1057/palgrave.kmrp.8500094>
- Nederlandsch Indie. (1931, Januari 17). *De Gooi- en Eemlander*.
- Nirwandhono, P. (2011). *yang ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia*. Penerbit Djaman Baroe.
- Nurmalasyari, N., Wulandari, N., & Putri, W. A. (2024). Transformasi Masyarakat Indonesia pada Masa penjajahan Bangsa Barat. *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59966/semar.v2i4.1317>
- Onghokham. (2008). Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX : Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah. Dalam *Dua Abad Pemilikan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Onghokham. (2018). *Madiun dalam kemelut Sejarah: Priyai dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ota, A. (2006). *Changes of Regime And Social Dynamics in West Java: Society, State And the Outer World of Banten, 1750-1830*. BRILL.
- Padmo, S. (1998). Perkembangan Kesempatan Kerja non-pertanian di Keresidenan Cirebon, 1830-1930. Dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. LP3ES.
- Pratama, Y. (2024). The Role of Herman Willem Daendels in Politics in the Dutch East Indies 1808-1811. *SWARNADWIPA*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24127/sd.v8i1.3278>
- Purwanto, B. (2003). Ekonomi Masa Kolonial. Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (2 ed.). Ichtiar Baru van Hoeve.
- Purwanto, B. (2004). Mereka yang Terlupakan oleh Historiografi Indonesia: Sebuah Catatan Pengantar. Dalam *Mereka*. Syarikat.
- Raben, R. (2000). Round about Batavia: Ethnicity and Authority in the Ommelanden, 1650-1800. Dalam *Jakarta: Socio-cultural Essays*. KITLV Press.
- Ress, D. F. W. van. (1902). *Het pauperisme onder de Europeanen in Nederlandsch-Indië: Eerste gedeelte*. Landsdrukkerij.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since C.1200* (4 ed.). Palgrave Macmillan.

- Robinson, R. (2012). *Soeharato dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Harsutejo, Penerj.). Komunitas Bambu.
- Sahasrad, H. (2019). Colonial Structure, Chinese Minority and Racial Violence in Indonesia: A Social Reflection. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(2), 209–221. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.253>
- Setiawan, Y., & Prasetyo, Y. (2023). Kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonial. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p56-65>
- Soekiman, D. (2014). *Kebudayaan Indies: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Komunitas Bambu.
- Susilowati, D. T., Rochwulaningsih, Y., & Rinardi, H. (2020). The Implementation of the Kampung Improvement Program in Semarang: Some Obstacles and Impacts. *Indonesian Historical Studies*, 4(2), 170–185. <https://doi.org/10.14710/ihis.v4i2.8951>
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Sunarto, Penerj.). Sinar Harapan.
- Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi*. Gadjah Mada University Press.
- Wahyono, E. (2017, November 18). *Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa Abad ke-19*. Seminar Nasional Riset Inovatif, Bali.
- Wertheim, W. F. (1947). The Indo-European Problem in Indonesia. *Pacific Affairs*, 20(3), 290–298. <https://doi.org/10.2307/2752163>
- Wertheim, W. F. (1956). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Van Hoeve.
- Zanden, J. L. van, & Marks, D. (2010). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (A. Wahid, Penerj.). Kompas.
- .